

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntabilitas merupakan pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai seberapa pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan.¹ Akuntabilitas bukan hanya sekedar laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik, selain itu akuntabilitas merupakan upaya pemerintah dalam menciptakan penyelenggara pemerintahan dalam menciptakan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance*.

Pemerintah daerah sebagai penggunaan anggaran belanja desa dituntut untuk transparan, akuntabel, dan professional. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Sumber pendapatan desa lebih lanjut dijelaskan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat 1: a) pendapatan asli desa (PAD), b) alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). c) bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah. d) Alokasi Dana Desa (ADD). e) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan

¹ Elgia Astuty. 2013. Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) (Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). *Publika*, hal 5

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. f) dana Hibah dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut dapat memunculkan permasalahan terhadap beberapa rumusan, termasuk dalam pelaksanaan anggaran desa yang di alokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang mencapai kurang lebih 800 Juta Rupiah. Mulai dari ketidaksetujuan terhadap besaran jumlahnya, ketentuan dalam pengolakan, termasuk masih adanya ketidakpercayaan, bahkan meremehkan terhadap kesiapan perangkat desa dalam pelaksanaan anggaran tersebut. Kerisauan tersebut semakin tinggi eskalasinya tatkala anggaran desa dari alokasi APBN tersebut berpeluang bagi rentan terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran atau praktik korupsi di Desa.

Besaran alokasi anggaran dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan dalam pasal 72 ayat 4 bahwasanya alokasi dana desa berasal dari APBN 10% dan bersumber dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Ketentuan alokasi sebesar 10% dari dana transfer daerah APBN untuk desa mencapai Rp. 60 triliun dan dibagi sekitar 74 ribu desa², dimungkinkan setiap desa bisa mengelola anggaran hingga kurang lebih Rp 800 juta setiap tahunnya. Adapun sumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dana yang dialokasikan oleh kabupaten untuk desa, sumber dana ini merupakan dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa.

² <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>

Sumber pendapatan desa yang bersumber dari Dana Hasil Pajak Daerah kabupaten/kota dan retribusi daerah, misalnya: bagi hasil pajak bumi dan bangunan, selain itu Pendapatan Asli Desa (PAD) terdiri atas hasil usaha, tanah kas desa, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Pendapatan Desa juga bersumber dari Dana Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat yang berbentuk donasi, hibah atau sumbangan, dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Sehingga dimungkinkan setiap desa dapat mengelola anggaran desa sebesar 1 Milyar lebih setiap tahunnya, meskipun didalam pembagian nominalnya tidak sama antara satu desa dengan desa yang lainnya. Besarnya alokasi juga disesuaikan dengan jumlah penduduk, luas wilayah, kondisi desa, dan ketentuan lainnya.

Besarnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah tentunya menjadi kekhawatiran oleh beberapa kelompok masyarakat, terutama penggiat organisasi masyarakat sipil anti korupsi, hal tersebut sudah dibuktikan dalam pelaksanaan praktik desentralisasi, dimana protret buruk penyalahgunaan anggaran, alih-alih hanya memindahkan korupsi dari pusat bergeser ke pemerintah desa saja, hal inilah yang menyebabkan setidaknya kurang lebih 900 kasus korupsi disektor desa di Indonesia³, sehingga melalui terjadinya penyimpangan anggaran ini dapat memberikan pelajaran yang berharga dimasa yang akan datang.

Besarnya anggaran desa yang diberikan oleh pemerintah dikhawatirkan menimbulkan korupsi di desa-desa semakin marak, terutama melibatkan penyelenggara pemerintah desa seperti yang terjadi di Provinsi Jawa Timur

³ <http://www.berdesa.com/12-modus-korupsi-dana-desa-versi-icw>

sendiri penyelewengan anggaran di sektor desa tercatat ada 110 kasus terjadinya korupsi.⁴ Besarnya anggaran menjadikan ketimpangan dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana tergambar kasus penyelewengan anggaran sektor desa di Kabupaten Bojonegoro. Penyelewengan terhadap anggaran desa di Kabupaten Bojonegoro hampir terjadi di berbagai desa, hal ini dibuktikan dengan banyaknya aduan ataupun laporan dari kelompok masyarakat tentang penyelewengan anggaran desa yang dilakukan oleh aparatur desa, tentunya permasalahan ini merupakan persoalan yang serius karena menyangkut nasib masyarakat desa setempat.

Dugaan penyelewengan anggaran desa di Kabupaten Bojonegoro seperti yang terjadi di Desa Jari Kecamatan Gondang maupun di Desa Trojalu Kecamatan Baureno sudah di tangani langsung oleh pihak kepolisian⁵. Hal tersebut membuktikan penyelewengan anggaran desa di Kabupaten Bojonegoro memang benar adanya, dan tidak menutup kemungkinan akan banyak lagi kasus yang serupa penyelewengan anggaran desa di Kabupaten Bojonegoro, sehingga pihak kepolisian berkerjasama dengan pemerintah Bojonegoro melakukan berbagai upaya pencegahan untuk mengawasi pengelolaan anggaran dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Edy Supriadi menjelaskan ada praktik penyelewengan anggaran dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan yang masih berlaku sekarang ini, sehingga masih ditemukan adanya ketimpangan antara peraturan dengan praktiknya terjadinya penyelewengan-

⁴ Istimaroh, http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/337543/97,27_persen_korupsi_dana_desa_oleh_kades_dan_istri.html

⁵ TulusAdarrma, http://beritajatim.com/hukum_kriminal/314062/kades_jari_dibui_dugaan_korupsi_dana_desa.html

penyelewengan anggaran. Edy Supriadi dalam penelitiannya menemukan bahwa di Kabupaten Lombok Tengah terdapat beberapa kepala desa yang tersandung kasus korupsi karena dugaan penyalahgunaan alokasi dana desa dan bantuan beras miskin (Raskin)⁶. Dari permasalahan tersebut terjadilah ketimpangan dalam pengelolaan keuangan desa, tentu merupakan persoalan yang serius karena menyangkut nasib masyarakat di desa setempat dan masyarakat merasa dirugikan.

Penelitian yang serupa juga dibuktikan oleh Ahmad Surya dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa dimulai setelah ada laporan atau pengaduan. Pihak penyidik tindak pidana korupsi sudah menerima laporan dari masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah terindikasi tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2016-2017, dimana sebagian besar adalah pelakunya kepala desa sebagai modusnya untuk melakukan tindak korupsi yaitu melakukan pengelembungan (*mark-up*) pengadaan barang dan jasa, pembangunan fisik yang tidak sesuai dengan perencanaan, dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan perencanaan anggaran desa.⁷

Pemberian kewenangan dalam keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 seharusnya desa semakin terbuka (*transparan*) dan *responsible* terhadap proses pengelolaan keuangan. Ketentuan umum tersebut diatur dalam pasal 27 ayat 3 yang menjelaskan, pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas

⁶ Edy Supriadi. 2015. Pertanggungjawaban Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, hal 332

⁷ Achmad Surya. 2018. Problematika Penyidik Dalam Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kabupaten Aceh Tengah. *RESAM Jurnal Hukum*, hal 8

kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksana kegiatan di desa,⁸ sehingga dengan hak otonom tersebut diharapkan desa dapat melaksanakan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain rencana anggaran biaya.

Namun didalam praktiknya, pelaksanaan APBDes masih terjadi penyelewengan anggaran yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa seperti kasus di Desa Tembeling, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro sehingga terjadi perlawanan dari masyarakat beserta BPD terhadap pelaksanaan anggaran APBDes tahun 2017 yang Awal mulanya kronologi terjadinya resistensi yang dilakukan oleh masyarakat tersebut melihat ada kejanggalan mengenai anggaran yang ditetapkan terhadap realisasi dilapangan tidak sesuai dalam APBDes Tahun 2017.

Seperti salah satu contoh rincian yang terdapat pada anggaran terlihat adanya pengelembungan (*mark-up*) anggaran, contohnya pada bantuan pembangunan WC untuk masyarakat yang kurang mampu anggaran tahun 2017 dengan nominal sebesar Rp 121.800.000,00 sehingga banyak warga yang menanyakan kepada BPD berapa sebenarnya bantuan yang diberikan per orang, kemudian BPD menanyakan kepada pemerintah Desa dan BPD bermaksud melihat RAB 2017, namun pemerintah desa tidak berkenan memperlihatkan RAB tersebut dengan alasan BPD tidak berhak melihat RAB. Sedangkan ada keterangan dari perangkat desa Tembeling yang lain bahwasannya ada 149 orang yang mendapatkan bantuan WC, contohnya Ibu Kanti RT 02 RW 01 hanya mendapatkan 2 buah doker dan 1 kloset saja. Ibu Kanti hanya

⁸ Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

mendapatkan bantuan senilai kurang lebih Rp 300.000,00 sedangkan kalau dihitung-hitung dana sebesar Rp 121.800.000,00 seharusnya per orang mendapatkan bantuan sebesar Rp 800.000,00 dan yang lebih memprihatinkan doker dengan dibuat sendiri dengan kualitas tidak baik dan disitulah masyarakat melihat terjadinya *mark-up* anggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa, dan masih banyak kasus lagi yang lainnya mengenai penyelewengan anggaran desa.⁹

Resistensi masyarakat beserta BPD merupakan bentuk-bentuk perlawanan terhadap pengelolaan APBDes yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, resistensi masyarakat beserta BPD itu muncul karena: 1) Pemerintahan Desa Tembeling dalam menjalankan pelaksanaan keuangan desa tidak transparan, terutama pengelolaan anggaran APBDes Tahun 2015, 2016 dan 2017. 2) Pemerintah Desa Tembeling tidak pernah melibatkan, memfungsikan BPD, padahal BPD adalah mitra kerja dan sebagai pengawas baik dalam pelaksanaan maupun dalam penyusunan RAB Desa. 3) Pelaksanaan tanda tangan BPD selalu dengan cara menekan, mengintimidasi atau menakut-nakuti anggota BPD untuk meminta tanda tangan, serta menandatangani ke rumah-rumah sebagai anggota BPD tentunya tindakan tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan termasuk cacat hukum. 4) Indikasi tindak pidana korupsi (tipikor) oleh Pemerintah Desa Tembeling.¹⁰

Masyarakat yang melihat terjadi *mark-up* anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tembeling, maka perwakilan masyarakat beserta BPD

⁹ AgusSetiyadialiansirakyatnews.com/2018/03/07/tak-puas-dengan-hasil-musyawarah-perwakilan-warga-dan-anggota-bpd-desa-tembeling-laporkan-kadesnya-ke-kejaksaan

¹⁰ AgusSetiyadialiansirakyatnews.com/2018/03/05/gejolak-warga-pemdes-dan-bpd-serta-masyarakat-at-desa-tembeling-adakan-musyawarah.

melaporkan ke Kejaksaan Bojonegoro dengan sebetulnya Laporan Anggaran APBDes tahun 2017. Laporan tersebut diwakili oleh Darto selaku warga Tembeling dan Abdul Malik selaku BPD Desa Tembeling. Darto perwakilan dari warga melaporkan 10 item anggaran APBDes yang di *mark-up* dan terdapat beberapa proyek anggaran yang tumpang tindih, sedangkan Abdul Malik perwakilan dari BPD menambahkan adanya penyelewengan APBDes tersebut sudah berjalan 3 tahun, dan selama 3 tahun BPD tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah Desa. Anggota BPD hanya dimintai tanda tangannya saja, sedangkan masalah anggaran digunakan untuk apa saja BPD tidak boleh tahu dan apabila tidak mau tanda tangan, maka BPD diintimidasi dengan cara menakut-nakuti agar mau menandatangani.¹¹

Berdasarkan fakta tersebut, maka pentingnya penelitian ini dilakukan agar mengetahui bagaimana akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes dan menjadi fokus dalam penelitian ini, karena didalam pengelolaan APBDes yang dilakukan oleh pemerintah desa kurang transparansi kepada masyarakat dan dianggap dalam pengelolaan APBDes terjadinya *mark-up* anggaran, sehingga timbul perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh warga untuk menuntut kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut yang melatarbelakangi penulis dalam melakukan penelitian tentang “Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan APBDes Tahun 2017 (Studi di Desa Tembeling Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro).”

¹¹ IsmiFausiah<http://www.suarajatimpost.com/read/13046/20180307/205134/dua-warga-desa-tembeling-laporkan-kepala-desanya-ke-kejari-bojonegoro/>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti merumuskan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017?
2. Apa sajakah persoalan dalam Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan mengenai Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017.
2. Untuk menjelaskan persoalan dalam Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian ini terbagi dua antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dan wawasan terhadap keliruwan di salah satu kajian Etika Pemerintahan yaitu mengenai akuntabilitas pemerintah desa dalam pelaksanaan APBDes. Selain itu juga memberikan wawasan kepada masyarakat akan manfaat yang bisa

diperoleh dari penelitian ini, serta dapat memberikan saran atau pun masukan dan kritik yang membangun.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Aparatur Desa Tembeling, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro bahwa penelitian yang dilakukan berguna untuk perbaikan atau rekomendasi pentingnya transparansi dalam pelaksanaan APBDes oleh pemerintah desa.

E. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan batasan terhadap masalah-masalah yang dapat dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam mengoperasionalkannya pada saat dilapangan. Untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan konsep yang ada dalam penelitian ini, maka akan ditentukan beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan yang akan diteliti, antara lain:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintah. Suatu pemerintahan yang menginginkan kinerja yang optimal harus mampu menerapkan prinsip akuntabilitas.

Akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak dan kewenangan meminta pertanggungjawaban tersebut.”¹²

¹² Isma Coryanata. 2012. Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, hal 116

Akuntabilitas dapat dimaknai sebagai suatu bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dimensi akuntabilitas yang berhubungan dengan penelitian ini adalah pertanggungjawaban kepala desa beserta jajarannya dalam mengelola APBDes secara efektif dan efisien, pertanggungjawaban program agar dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan, pertanggungjawaban kebijakan serta menjalankan sistem yang transparansi. Transparansi didalam penelitian ini adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

2. Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan instansi atau lembaga pemerintah yang memiliki wewenang mengatur dan mengelola suatu desa. Berdasarkan kebijakan yang termaksud dalam UU Desa, pemerintah desa dapat dimaksudkan sebagai berikut:

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.”¹³

Dengan demikian, desa dengan segala karakteristiknya yang khas dan penuh dengan kearifan lokal memiliki struktur aparatur yang terdiri atas kepala desa dan jajaran Kepala Urusan serta Kepala Bidang. Selain itu, dalam konteks pengawasan kinerja desa, ada BPD yang juga menjadi wakil dari masyarakat desa dalam berbagai aspek termasuk urusan mengakomodir kepentingan masyarakat desa.

¹³ Ibid Pasal 1

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan upaya untuk menghidupkan kembali peran penting desa dalam proses pembangunan nasional. Otonomi desa memberi ruang gerak yang luas untuk mengatur perencanaan pembangunan atas dasar kebutuhan prioritas masyarakat desa tanpa terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi pemerintah. Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah.¹⁴

3. APBDes

APBDes adalah instrumen penting yang menentukan didalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik dan melaksanakan pembangunan ditingkat desa. APBDes sebagai sebuah dokumen publik sudah seharusnya disusun dan dikelola berdasarkan azaz:

- a. Partisipatif merupakan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses pembangunan adalah suatu langkah awal guna mencapai keberhasilan suatu pembangunan.
- b. Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan.

¹⁴ Nyimas Latifah Letty Aziz. 2016. Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*, hal 196

c. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan yang telah ditetapkan

Dari ketiga asas diatas inilah pelaksanaan keuangan desa/APBDes bisa dapat terarah secara teratur sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat agar dapat membiayai pembangunan desa. Rakyat yang hakekatnya sebagai pemilik anggaran haruslah diajak bicara darimana dan berapa besar pendapatan desa dan diajak untuk musyawarah untuk apa uang Desa dibelanjakan, dan dengan demikian harapan tentang anggaran yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat benar-benar terwujud dan dapat memberikan arti serta nilai bahwa tatakelola pemerintahan desa dijalankan dengan baik.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah pendefinisian dari masing-masing konsep yang digunakan dalam penelitian secara operasional dan nyata. Adapun konsep yang akan didefinisikan secara operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

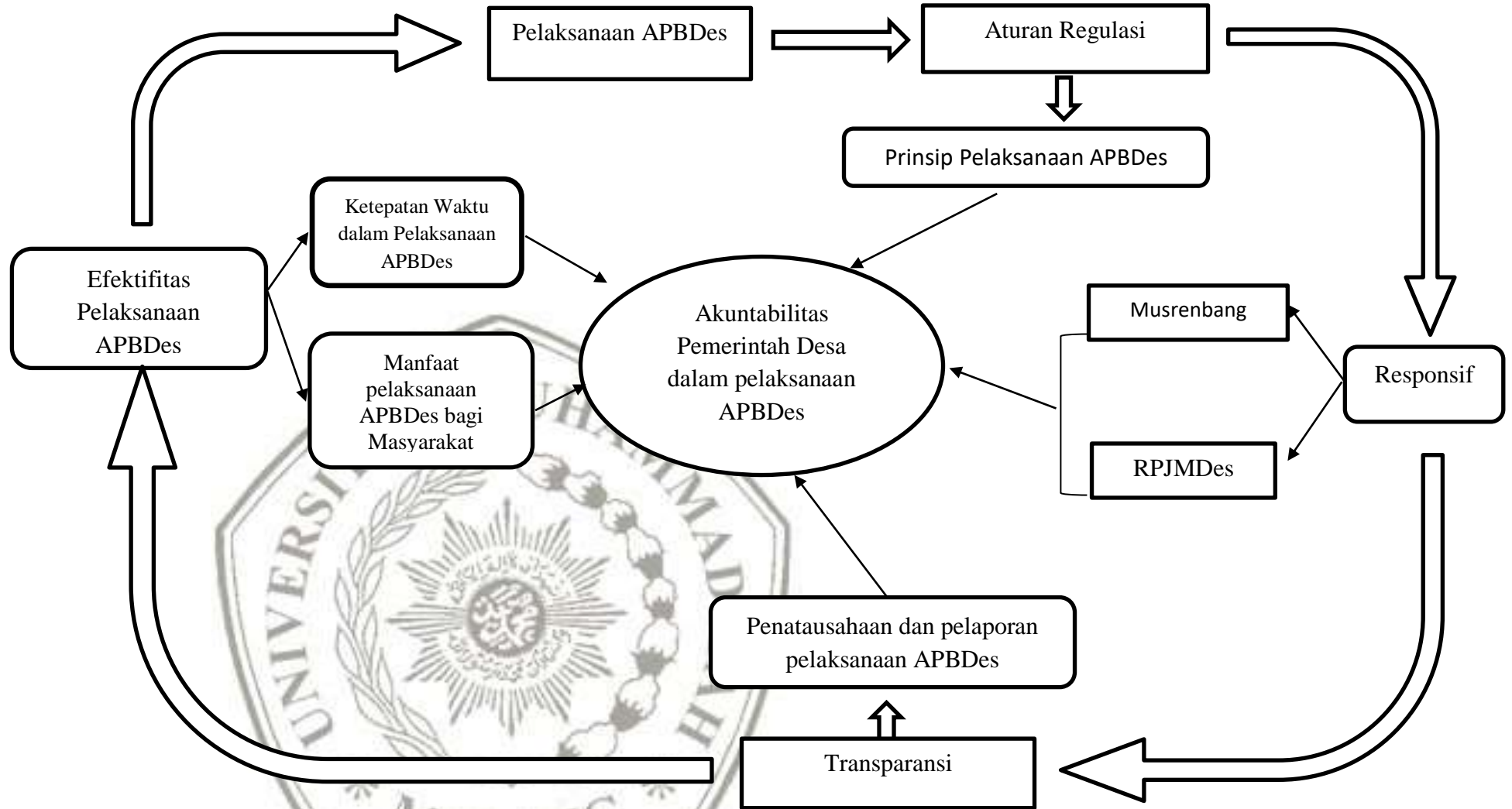
1. Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan APBDes Tembeling Tahun 2017
2. Pedoman Peraturan Tata Kelola Keuangan Desa Dalam Pelaksanaan APBDes
 - a. Prinsip – Prinsip Pelaksanaan APBDes

3. Responsivitas Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan APBDes
 - a. Proses Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
 - b. Pelaksanaan Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
4. Transparansi dalam Pelaksanaan APBDes
 - a. Penatausahaan dalam Pelaksanaan APBDes
 - b. Pelaporan dalam Pertanggungjawaban APBDes
5. Efektivitas dalam Pelaksanaan APBDes
 - a. Ketetapan dalam Pelaksanaan APBDes
 - b. Manfaat pelaksanaan APBDes bagi masyarakat
2. Permasalahan dalam Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan APBDes Tahun 2017
 - a. Transparansi dalam pelaksanaan APBDes
 - b. Efektivitas Pelaksanaan APBDes.



G. Kerangka Berfikir

KERANGKA BERFIKIR



Dalam pelaksanaan APBDes tentunya berdasarkan prinsip aturan yang berlaku sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, merupakan suatu tindakan perbuatan hukum yang berlaku, atau peraturan yang ada, baik aturan hukum formal, etnis, maupun hukum kemasyarakatan yang sudah lama tercipta secara sah. Dengan demikian pemerintah desa harus mentaati aturan yang ada, responsive terhadap aspirasi masyarakat dalam usulan musrenbang yang meliputi: bidang pembangunan, pemberdayaan, pembinaan dan pendidikan, oleh karena itu dalam penggalian aspirasi masyarakat dapat digali mulai dari tingkat paling bawah (lingkungan, RT). Dengan demikian pemerintah desa menanggapi aspirasi masyarakat melalui musrenbang yang mengacu pada RPJMDes dan RKP Desa.

Pada bagan diatas merupakan sebuah proses kerangka berfikir untuk mempermudah peneliti menjawab permasalahan yang nantinya akan dijabarkan di bab IV, kerangka berfikir tersebut didasari menggunakan konsep David Hulme dan Mark Turney bahwasannya menggunakan 6 indikator yang menjadi pencapaian dalam akuntabilitas. Diantaranya : 1) legitimasi para pembuat kebijakan, 2) Keberadaan kualitas moral yang memadai, 3) Kepekaan, yang dimaksud dengan kepekaan adalah responsive aparatur sebagai pelaksana kebijakan, 4) Keterbukaan, keterbukaan merupakan bentuk dari transparansi aparatur pembuat kebijakan, 5) Pemanfaatan sumber daya manusia secara optimal, 6) Upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi

Dari beberapa indikator yang dikemukakan oleh David Hulme dan Mark Turney peneliti menafsirkan beberapa Item yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti namun dari ke enam indikator tersebut tidak semua peneliti gunakan akan tetapi dari indikator tersebut

disesuaikan dengan permasalahan yaitu hanya menggunakan empat indikator dari konsep David Hulme dan Mark Turney yaitu : Legitimasi para pembuat kebijakan, Kepekaan, Keterbukaan, dan Upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi.

Sebagaimana dalam aspek tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dituntut dengan transparansi anggaran keterbukaan erat kaitanya dengan loyalitas kerja berupa kejujuran aparat sebagai pemegang amanah bertanggungjawab dan transparansi penggunaan anggaran kepada masyarakat melalui penatausahaan dan pelaporan pelaksanaan APBDes. Kebijakan yang sudah dilaksanakan dengan efektif dalam pelaksanaan APBDes dalam tata kelola pemerintahan desa untuk melaporkan (mempertanggungjawabkan), secara konstitusional penyelenggara pemerintah desa merupakan seluruh proses kegiatan manajemen pemerintah desa.

Dalam salah satu prinsip pelaksanaan otonomi yaitu dilaksanakannya otonomi secara luas, nyata dan bertanggungjawab, tidak terkecuali dalam hal pelimpahan kewenangan urusan pemerintah, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan yang dilimpahkan dari kabupaten. Dalam pelaksanaan pemerintah desa tersebut dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yang dimana *good governance* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk tanggungjawab pelaksanaan pemerintah desa atas pencapaian keberhasilan ataupun kegagalan.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian *problem solution* karena penelitian ini berusaha untuk menemukan solusi yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaannya tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan¹⁵. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif sendiri harus berdasarkan pada pondasi penelitian, paradigma penelitian, perumusan masalah, tahapan penelitian, kriteria dan teknik pemeriksaan data dan penafsiran data.¹⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Tylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.¹⁷ Maka dari itu penulis memilih jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif sebab dari hasil penelitian akan didasarkan pada data dan hasil pengamatan berupa informasi yang mendalam terkait permasalahan yang terjadi di desa Tembeling.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti mendapatkan data-data dan informasi yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini bertempat di desa Tembeling Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro.

¹⁵ Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, hal 2

¹⁶ Sudarto. 2002. *Metodologi Penelitian dan Filsafat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal 63

¹⁷ Lexy J Moleong. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hal 4

3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan pihak yang menjadi sasaran penelitian guna untuk memperoleh informasi terkait dengan topik yang diteliti. Subyek penelitian dapat pula disebut sebagai informan. Subjek dalam penelitian ini merupakan pihak-pihak terkait yang paham dan menjadi sasaran dari Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan APBDes. Adapun subyek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris Desa
- b. Bendahara Desa
- c. Badan Permusyawaratan Desa
- d. Tokoh Masyarakat
- e. Warga Tembeling
- f. Ketua RW 01
- g. Ketua RW 02

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data atau sumber informasi yang menjadi perhatian untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka sumber data yang dipergunakan untuk menyediakan informasi ada dua sumber yaitu:

- a. Data primer, yaitu sumber informasi yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau obyek yang memahami tentang masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini. Sumber informasi yang dimaksud yaitu sumber yang berhubungan dengan akuntabilitas pemerintah desa dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

- b. Data sekunder, yaitu data yang dipergunakan dalam penelitian untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer. Data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau arsip-arsip, buku literature, internet, dan berkaitan dengan judul penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah serangkaian kegiatan yang wajib dilakukan dalam menghimpun data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Teknik yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam penelitian ini diantaranya:

a. Observasi

Pengumpulan data melalui teknik ini dilakukan peneliti dengan cara turun langsung ke lapangan, melihat lokasi objek penelitian, melakukan pengamatan atau pun mencatat segala sesuatu yang masih berkaitan dengan penelitian. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.¹⁸ Observasi yang dilakukan oleh peneliti berupa observasi secara langsung, yaitu bagaimana akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes.

Tujuan dilakukan metode observasi ini tidak lain adalah untuk mengetahui kenyataan secara langsung, gambaran objek di lapangan tanpa ditutupi atau mendapatkan informasi dari orang ketiga. Hasil data dan informasi dari metode observasi yaitu keadaan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan APBDes dan melihat dari segi aparatur pemerintahan Desa.

¹⁸ Margono, 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, hal 158

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁹ Ciri utama wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Teknik wawancara dilakukan secara terstruktur, artinya pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan sudah dipersiapkan sebelumnya. Adapun informan yang akan diwawancarai adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Badan Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen. Dokumentasi berfungsi sebagai data pelengkap atau pendukung dari data primer yang didapatkan. Dokumentasi ini nantinya lebih mengarah kepada analisa terhadap dokumen laporan pertanggungjawaban APBDes maupun peraturan perundang-undangan dari Pemerintah desa.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif yaitu data yang diperoleh lalu dianalisis dengan melakukan pemaparan serta intepretasi secara mendalam. Teknik analisis kualitatif adalah untuk memperoleh kedalaman penghayatan terhadap interaksi-interaksi antar

¹⁹ *Op.Cit.*, Lexy J Moleong, hal 186

konsep yang sedang dikaji secara empiris, data yang digambarkan, diuraikan dalam diinterpretasi dengan menggunakan kata-kata untuk ditarik suatu kesimpulan.

Data penelitian yang terkumpul disusun dalam kategori tertentu, fokus tertentu, dan pokok permasalahan tertentu. Selanjutnya, hasil dari proses pengumpulan data tersebut direduksi dan dimasukkan dalam pola, kategori, fokus atau tema yang sesuai dengan variabel-variabel yang telah dirumuskan. Kesimpulan data tersebut dirangkum, diihtisarkan atau diseleksi untuk diredaksionalkan secara tertentu dalam masing-masing pola, kategori, fokus atau tema yang sudah ditemukan.

Pengumpulan data dan analisis pada praktiknya tidak secara mudah dipisahkan, keduanya dikerjakan dengan bersama artinya analisis data memang seharusnya dikerjakan bersama dengan pengumpulan data kemudian dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai dikerjakan.²⁰ Hasil keseluruhan dari proses analisa data kualitatif adalah berupa penguraian, penggambaran dan penuturan tentang apa yang dimengerti dan ditangkap penulis, sehingga menghasilkan sebuah pemaknaan dan kesimpulan yang komperhensif dan mendalam.

Dalam menganalisis data, peneliti melakukan tiga tahap analisa data yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang mempertegas menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan

²⁰ Imam Gunawan. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, hal 210

mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi. Adapun data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data primer maupun data sekunder yang dianalisa kualitatif yang bertujuan untuk mengelola data agar data tersebut mempunyai makna yang jelas.

Reduksi data diawali dengan mengorganisir data berupa bacaan dari internet, jurnal, dokumen lain, hasil wawancara maupun observasi lapang tentang pengelolaan APBDes ke dalam komputer, kemudian dibuatkan data base agar mudah dicari dikemudian hari.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan dan pengambilan tindakan terkait dengan pengelolaan APBDes. Penyajian data biasanya berupa kata-kata, tabel dan sebagainya. Tujuan penyajian data adalah untuk mengklasifikasikan data yang sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, sehingga data akan lebih mudah untuk dipahami.

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya yang keterkaitan dengan pengelolaan APBDes. Miles dan Huberman menyatakan, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.²¹

²¹ Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, hal 95

c. Menarik Kesimpulan

Menganalisis dan mengkaji kebenaran dan validasi data yang ada terkait pengelolaan APBDes. Hasil analisa data diartikan sebagai proses pemeriksaan proses terhadap alur analisis data untuk mengetahui proses munculnya kesimpulan penelitian mengenai pelaksanaan APBDes. Tujuannya untuk menyempitkan dan membatasi suatu penelitian sehingga menjadi data yang teratur dan akhirnya data tersebut mempunyai makna, sehingga mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan. Dengan metode tersebut, peneliti berharap dapat terjawab dengan baik dan tepat.

